
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERKOTAAN (PNPM-MP) DI DESA BLIGO KABUPATEN SIDOARJO**

Rahayu Kristiniati
Ilmi Usrotin Choiriyah

(Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jln. Mojopahit No. 666 B Sidoarjo
email: rahayu@yahoo.com; ilmi.usrotinchoiriyah@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MP sudah berjalan dengan baik dan berhasil. Hal tersebut dikarenakan pada tahapan partisipasi yang terdiri dari tahap pemantauan dan evaluasi, tahap pemeliharaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan sudah berjalan dengan baik. Namun, dalam tahap pengambilan keputusan dan tahap pelaksanaan masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan pelaksanaan program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Faktor pendukung tersebut adalah komitmen kepala desa, keaktifan anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat, dan komitmen pelaku dan dukungan dari kelompok kepentingan. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah kurang aktifnya pengawas Unit Pengelola Keuangan sehingga ada keterlambatan dua Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pengembalian dana bergulir, keterlibatan masyarakat yang kurang merata dalam setiap kegiatan.

Kata kunci: partisipasi, pemberdayaan, PNPM mandiri perkotaan

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM FOR URBAN (PNPM-MP) IN BLIGO VILLAGE, SIDOARJO REGENCY

ABSTRACT

The purpose of this study was describe the community participation in the implementation of the National Community Empowerment Program for Urban (PNPM-MP) in the Bligo village, Candi sub-district, Sidoarjo Regency as well as to describe the supporting factors and inhibiting factors. The method of this research used qualitative description. The results of this research show that community participation in this program implementation has been running well. It is caused at the participation stages that is consisting of monitoring and evaluation stage, the maintenance stage, and utilization of the building has been running well. However, at the decision-making stage and the implementation stage must be improved. The successful of this program implementation is influenced by supporting factors and inhibiting factors. The supporting factor is commitment of head village, participation of non-governmental organization, commitment and support of interest groups. Meanwhile, inhibiting factors are less of supervisor participates in the manager finance unit. So there are two of non-governmental organizations that delay to refunds and community participation that is not involved in the whole of each activity.

Keywords: participation, empowerment, national community empowerment program for urban

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengandung pengertian bahwa hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Namun pada realitanya pembangunan yang sudah berjalan saat ini secara keseluruhan belum dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia hingga lapisan bawah. Sehingga, menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya kemiskinan. Angka kemiskinan di Indonesia pada September 2013 tercatat sebesar 11,47 persen atau 28,55 juta orang. (BPS, 2014).

Salah satu cara yang ditempuh mengatasi kemiskinan adalah memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan komunitas pedesaan, sehingga mampu mengenali potensi-potensi

yang ada, mendayagunakan secara optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil pembangunan merupakan salah satu kunci dari setiap upaya pembangunan, sebab pembangunan tanpa partisipasi masyarakat hanya menimbulkan ketergantungan masyarakat sehingga mereka menjadi obyek dalam proses pembangunan.

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat ini sejalan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah, yang tujuannya mengurangi tingkat ketergantungan daerah pada pusat juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah diberikan keleluasaan mengatur daerahnya sendiri, mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga bermunculan kreatif dan daya inovasi masyarakat dalam menciptakan potensi yang dimilikinya. Dengan otonomi daerah, masyarakat dapat mengekspresikan kepentingan dan kebutuhan, selanjutnya merekalah subyek pembangunan, masyarakat mempunyai pilihan untuk memutuskan pilihan kegiatan secara demokratis. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan pembangunan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu program pembangunan yang berfungsi meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di tingkat pedesaan dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin yang ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi obyek melainkan sebagai subyek penanggulangan kemiskinan (Depdagri, 2008).

Pelaksanaan PNPM-MP di Desa Bligo dimulai dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, pelaksanaannya dilaksanakan dalam tiga bidang yaitu bidang sosial, bidang ekonomi dan bidang lingkungan. Masyarakat bersama-sama melaksanakan setiap program-program yang telah disepakati sehingga Desa Bligo menjadi lebih baik, jalan-jalan yang semula tanah dan becek sekarang tidak ada lagi tergantikan dengan jalan paving sehingga akses menuju ke desa menjadi lancar dan perekonomian meningkat. Sebelumnya di sepanjang sungai Kedunguling (samping PG Candi) dijumpai *helikopter* buatan penduduk sebagai penutup saat buang air besar, namun sekarang sudah bersih. Masyarakat sudah

terbiasa membuang hajat di WC ataupun MCK umum dengan demikian taraf kesehatan meningkat.

Masyarakat miskin terutama ibu-ibu juga sudah memiliki ketrampilan, yakni dengan adanya berbagai hasil olahan sendiri yang dititipkan di Kios Nusantara yang merupakan Kios milik PNPM-MP. Kegiatan Ekonomi modal bergulir juga sangat diminati masyarakat, dengan indikator setiap tahunnya peminjam bertambah dengan jumlah pinjaman yang meningkat pula, serta beberapa hasil lain yang telah dirasakan oleh warga Desa Bligo. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PNPM-MP di Desa Bligo telah memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat, yakni dengan diraihnya juara 1 Tingkat Kabupaten dan mendapatkan juara Harapan 2 di Tingkat Propinsi Jawa Timur.

Dari pemaparan di atas, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MP di Desa Bligo Kecamatan Candi, serta apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PNPM-MP di Desa Bligo Kecamatan Candi? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM-MP dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PNPM-MP di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

LANDASAN TEORETIS

Partisipasi

Partisipasi masyarakat menurut Tjokroamidjojo adalah ikut dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pembangunan dan keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan sehingga masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana pembangunan tapi juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan hasil serta dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang sudah dicapai. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan di upayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berarti, dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan

demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Jika masyarakat dilibatkan mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Dengan dibukanya kesempatan berpartisipasi, warga menjadi lebih memiliki perhatian terhadap permasalahan yang ada dilingkungannya dan memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dapat berkontribusi untuk ikut mengatasinya.

Selain itu, Arif (2012) menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Yadav (UNAPDI, 1980) menambahkan adanya empat kegiatan yang menunjuk partisipasi dalam kegiatan pembangunan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Pada umumnya setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak, karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan yaitu adanya pemerataan sumbangan masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, ketrampilan, buah pikiran dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat. Partisipasi berikutnya partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan yang sangat diperlukan bukan saja agar tujuan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan partisipasi terakhir adalah partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan karena tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan, juga partisipasi dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah diselesaikan, untuk itu diperlukan kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna

memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati dalam jangka yang panjang.

Apabila masyarakat sudah berpartisipasi dan berperan dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan muncul kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 yang menjelaskan Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan, meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya penguatan kapasitas masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2003), pemberdayaan merupakan proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan. Hal itu demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif dan semakin sejahtera secara berkelanjutan. Sehingga dapat diartikan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan dari pihak luar untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya sendiri.

Untuk mewujudkan transformasi dari kondisi masyarakat tidak berdaya/miskin menuju masyarakat berdaya, sedikitnya terdiri dari empat hal yaitu :

1. Internalisasi nilai-nilai dan prinsip prinsip universal, sebagai pondasi kokoh memberdayakan masyarakat menuju tatanan yang mampu mewujudkan kemandirian dan pembangunan berkelanjutan.
 2. Penguatan lembaga masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok (*community based development*), masyarakat membangun dan mengorganisir diri atas dasar ikatan pemersatu, antara lain kesamaan kepentingan dan kebutuhan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili, dan lain-lain, yang mengarah pada upaya mendorong tumbuh berkembangnya kapital sosial.
 3. Pembelajaran penerapan konsep tridaya dalam penanggulangan kemiskinan, menekankan pada proses pemberdayaan sejati (bertumpu pada manusia-manusianya) dalam rangka membangkitkan ketiga daya yang dimiliki manusia,
-

agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, tercipta masyarakat ekonomi produktif dan masyarakat pembangunan yang mampu mewujudkan lingkungan perumahan dan pemukiman sehat, produktif dan lestari.

4. Penguatan akuntabilitas masyarakat, menekankan pada proses membangun dan menumbuhkan segenap lapisan masyarakat untuk peduli melakukan kontrol sosial obyektif dan efektif, sehingga menjamin pelaksanaan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan mendorong kemandirian serta keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing (pedoman pelaksanaan pnpm mandiri 125: 2008).

PNPM Mandiri Perkotaan

Salah satu program nasional untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau disingkat PNPM Mandiri. Dasar pelaksanaan PNPM-MP yaitu Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Program tersebut berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat secara individu maupun berkelompok, untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi dengan baik dan benar. Program tersebut meliputi program mandiri perkotaan dan mandiri pedesaan, karena lokasi penelitian adalah PNPM-Mandiri Perkotaan maka yang akan dibahas selanjutnya adalah PNPM Mandiri perkotaan.

PNPM Mandiri Perkotaan yang selanjutnya disebut PNPM-MP berorientasi membangun pondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap/perilaku/cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap selanjutnya berorientasi membangun transformasi menuju masyarakat mandiri, dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan PNPM ini harus berprinsip pada: (a) bertumpu pada pembangunan manusia, (b) berorientasi pada masyarakat miskin, (c) partisipasi masyarakat terlibat secara aktif pada setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan, (d) otonomi dalam pelaksanaan PNPM masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola, (e) desentralisasi, (f) kesetaraan dan keadilan gender, laki-laki dan perempuan

mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan, (g) demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin, (h) transparansi dan akuntabel, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif, (i) prioritas, pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas, (j) kolaborasi, semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan, (k) keberlanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini, tapi juga masa depan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan, (l) sederhana, semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM harus sederhana fleksibel, mudah dipahami dan mudah dikelola oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berlokasi di Desa Bligo Kecamatan Candi. Sedangkan fokus penelitian adalah partisipasi Masyarakat Desa Bligo Kecamatan Candi dalam rangkaian pelaksanaan PNPM-MP serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PNPM-MP. Informan yang mendukung data penelitian antara lain: Koordinator LKM Bligo Berseri beserta pengurus dan unit pelaksanaannya, Kepala Desa Bligo, Perwakilan KSM, perwakilan Warga Bligo penerima manfaat program PNPM-MP.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi di lapangan dengan melakukan pengamatan pada obyek penelitian, interview dengan informan, dan peneliti menulis, melihat, dan mempelajari arsip-arsip atau dokumen. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:15-20), antara lain reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat Desa Bligo Kecamatan Candi dalam pelaksanaan PNPM-MP

Desa Bligo salah satu desa di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah \pm 79.605 Ha berpenduduk 5.608 Jiwa yang terdiri dari 1.835 KK yang tersebar di 20 RT dan 8 RW dengan jumlah penduduk laki-laki 2.803 jiwa dan perempuan 2.805 jiwa. Mayoritas penduduk bermata pencaharian karyawan swasta. Angka kemiskinan terbanyak di Desa Bligo berada di RW 06 dengan jumlah penduduk sebanyak 253 jiwa (25,6%) dari keseluruhan penduduknya yang tercatat sebanyak 987 jiwa.

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PNPM-MP di Desa Bligo dalam naungan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Bligo Berseri, berdiri pada tanggal 5 Oktober 2009 yang sekarang memasuki periode ke 2 (dua) dan sudah didaftarkan dalam akta notaris pada tanggal 25 Januari 2012 dengan beranggotakan 13 orang terdiri dari 9 laki-laki dan 4 perempuan. PNPM-MP dapat dilihat sebagai program pemberdayaan yang menekankan pada revitalisasi modal sosial yang dimiliki masyarakat, berupaya menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatannya.

Partisipasi masyarakat dalam rangkaian pelaksanaan PNPM-MP di Desa Bligo pada periode pertama adalah partisipasi di dalam tahap pengambilan keputusan. Tahap perencanaan kegiatan PNPM-MP di Desa Bligo Kecamatan Candi dimulai dari sosialisasi terhadap program-program PNPM kepada masyarakat melalui forum pengajian, pertemuan RT, pertemuan RW, Pertemuan PKK. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh kepala desa beserta perangkatnya, kemudian dari sosialisasi tersebut menghasilkan relawan-relawan PNPM yang dengan sukarela akan menjadi pelaku terdepan bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan kegiatan PNPM-MP. Selanjutnya kepala desa mengundang perwakilan RT, perwakilan RW, tokoh masyarakat serta relawan untuk membahas program-program PNPM-MP berbentuk Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) untuk jangka waktu 3 tahun yang dirinci dalam rencana tahunan (renta). PJM pronangkis inilah yang menjadi acuan warga untuk membentuk KSM dan menyusun Pproposal pengajuan dana.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengambilan keputusan selalu melibatkan masyarakat. Hal tersebut terbukti dari keikutsertaan atau partisipasi sebagian masyarakat (perwakilan RT, RW, tokoh masyarakat, relawan) yang turut hadir dalam acara *rembug* warga tahunan. Laporan

keikutsertaan masyarakat dalam acara rembug tahunan tersebut dapat kita lihat dari tabel 1 berikut:

Tabel 1.

Tingkat Kehadiran Masyarakat dalam Rembug Warga Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah Kehadiran Masyarakat		
	Laki-laki	Perempuan	Masyarakat Miskin
2010	27 orang	15 orang	14 orang
2011	45 orang	57 orang	56 orang
2012	46 orang	47 orang	51 orang
2013	29 orang	46 orang	50 orang

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2014

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata partisipasi masyarakat setiap tahunnya semakin menurun. Hanya pada periode tahun 2011 yang mengalami peningkatan pada tingkat partisipasi masyarakat. Sedangkan untuk tahun 2012 dan 2013 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat semakin menurun. Hal ini disebabkan antusias warga semakin menurun dalam pelaksanaan *rembug* warga. Sebagian masyarakat hanya mau menerima setiap keputusan musyawarah tanpa mau ikut terlibat secara aktif dengan alasan tidak menerima undangan, sibuk bekerja, bahkan merasa bahwa program PNPM-MP ini hanya untuk masyarakat miskin saja sehingga mereka tidak mau untuk ikut dalam *rembug* pengambilan keputusan.

Seharusnya pelaksanaan pengambilan keputusan/perencanaan dihadiri banyak warga baik miskin maupun kaya. Partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan menentukan suatu program/kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya obyek pembangunan semata, tetapi juga merupakan subjek pembangunan. Kedudukan sebagai subyek pembangunan berarti anggota masyarakat hendaknya memiliki kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motifasi, kerjasama dan wawasan yang kuat dan melekat pada diri anggota masyarakat terhadap pembangunan. Perencanaan/penentuan program pembangunan (PNPM Mandiri) oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah atau sering disebut *bottom-up planning*. Program-program pembangunan yang direncanakan sendiri oleh masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan tidak memberatkan masyarakat.

Program-program tersebut dapat dilaksanakan oleh masyarakat apabila dana sudah cair, baik di bidang-bidang sosial, lingkungan maupun di bidang ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2013 LKM *Bligo Berseri* telah menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM): di bidang lingkungan 17 KSM dengan jumlah penerima 1193 jiwa, di bidang sosial 14 KSM jumlah penerima 212 jiwa, di bidang ekonomi 45 KSM dengan jumlah penerima 182 jiwa.

Setiap KSM membuat proposal pengajuan dengan mencantumkan jumlah partisipasi masyarakat. Apabila dana sudah cair sesuai dengan pengajuan proposalnya maka dengan segera pembangunan lingkungan, ekonomi maupun kegiatan sosial dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat secara bergotong royong baik laki-laki maupun perempuan membangun atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan dana yang telah diperoleh. Partisipasi masyarakat tidak hanya berupa uang saja melainkan ada yang berupa makanan, minuman, tenaga, material untuk kelancaran kegiatan dimaksud. (Wawancara dengan koordinator LKM, 4 Mei 2014).

Dalam bidang ekonomi diselenggarakan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK), kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan berbentuk ekonomi bergulir, yakni pemberian pinjaman modal usaha ke masyarakat dengan sistem pembayaran berangsur dan tanggung renteng. Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang memiliki atau yang mau melakukan usaha-usaha produktif atau usaha kecil menengah (UKM) yang terdaftar dalam keluarga miskin dengan syarat melampirkan fotokopi KTP dan KSK. Satu KSM terdiri atas minimal 5 (lima) orang diupayakan satu lingkungan (RT atau RW). Dana pinjaman dapat diangsur sebanyak 10 kali yang dikenakan bunga 2% dengan rincian 1,5% untuk bunga sedangkan 0,5% dikembalikan kepada peminjam berupa Voucher sembako bagi yang aktif membayar. Hasil temuan di lapangan menunjukkan terdapat 2 KSM yang sampai sekarang masih macet dalam pengembalian, dengan alasan uang tersebut tidak digunakan untuk tambahan modal tapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dana yang digulirkan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan PNPM-MP untuk Desa Bligo tahun 2010 dengan total anggaran sebesar Rp 205.000.000,00 (Dua ratus lima juta rupiah), di tahun 2011 sebesar Rp 92.500.000,00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tahun 2012 sebesar Rp 152.500.000,00 (Seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp 79.503.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu rupiah), sedangkan kegiatan tridaya tahun 2013 sebagai berikut:

1. Bidang Sosial, nama kegiatan pelatihan untuk relawan berlokasi di RW 01- RW 08 bersumber dana dari BLM PNPM sebesar Rp 10.000.000,00
2. Bidang Lingkungan, jenis kegiatan pembangunan 13 Unit MCK Pribadi berlokasi di RT 06, RT 07, RT 08, RT 10, RT 14 sumber dana dari BLM PNPM MP sebesar Rp 19.253.000,00 dan partisipasi masyarakat sebesar Rp 4,175.900,00 total dana sebesar Rp 23.428.900,00
3. Bidang Lingkungan, jenis kegiatan rehab rumah berlokasi di RT 09 dan RT 14 bersumber dana dari BLM PNPM-Mp sebesar Rp 25.000.000,00 partisipasi masyarakat sebesar Rp 15.500.000,- total dana sebesar Rp 40.500.000,00
4. Bidang Ekonomi, jenis kegiatan dana bergulir berlokasi di RT: 06, 11, 10, 13 bersumber dana dari BLM PNPM sebesar Rp 23.250.000,00

Setelah pelaksanaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemantauan yaitu kegiatan untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur program atau tidak. Kegiatan ini dilakukan di seluruh tahapan kegiatan program: sejak pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Pelaku pemantauan adalah masyarakat, aparat pemerintah di berbagai tingkat, konsultan, fasilitator, lembaga donor dan lain-lain. Manfaat dari pemantauan adalah untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan, sebagai input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program dan dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku program dan masyarakat.

Hasil penelitian di Desa Bligo menunjukkan bahwa sudah dilaksanakan pemantauan dan pengawasan, hal tersebut dapat dilihat dari penunjukan seorang pengawas UPK dan dibentuk Tim pengawas di setiap kegiatan yang dicantumkan di setiap proposal. Setiap bulan, kegiatan yang telah dilaksanakan diumumkan lewat papan pengumuman di lima titik yang dapat dilihat secara langsung oleh Masyarakat Desa Bligo. Setiap tahun dilaksanakan *rembug* warga untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban dan Rencana Tahunan Kegiatan PNPM-MP, sedangkan dari Tim Independen melaksanakan audit setiap tahun sekali. Bahkan sering mendapatkan kunjungan dari BPK pusat. Sampai saat ini, pelaksanaan tersebut tidak ditemukan permasalahan, hal ini berarti bahwa pelaksanaan PNPM-MP di Desa Bligo telah terlaksana sesuai dengan program yang telah dibuat sebelumnya.

Selanjutnya pembangunan maupun kegiatan lain yang telah terlaksana hendaknya dapat dimanfaatkan dan dipelihara. Kegiatan PNPM Mandiri perkotaan meliputi menerima hasil pembangunan seolah-olah hasil pembangunan itu merupakan milik sendiri dan menggunakan atau memanfaatkan hasil pembangunan. Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Penerimaan terhadap hasil pembangunan yang merupakan milik dan tanggung

jawab bersama, membuat masyarakat aktif menjaga dan memelihara serta memanfaatkan hasil pembangunan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menganggap hasil pembangunan itu adalah milik sendiri sehingga antusias memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menjadikan ataupun mengusahakan menjadi lapangan usaha, merawat secara rutin, mengusahakan dan mengamankan serta mengembangkan hasil kegiatan. Aspek manfaat kegiatan PNPM-MP ini dirasakan oleh Masyarakat Bligo sangat besar, yaitu jalan-jalan yang dulunya becek sekarang tidak sehingga meningkatkan harga jual tanah; banyak masyarakat yang memiliki ketrampilan sehingga meningkatkan pendapatan; serta banyaknya penduduk yang mempunyai WC sehingga kesehatan Masyarakat Bligo menjadi meningkat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PNPM-MP di Desa Bligo Kecamatan Candi

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Bligo Kecamatan Candi, menemui beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan mencapai tujuan program. Faktor pendukung tersebut meliputi:

1. Komitmen pimpinan politik (Pimpinan Pemerintah), Komitmen Pemerintah Desa Bligo dalam hal ini Kepala Desa Bligo beserta perangkat desa untuk mendampingi program PNPM-MP.
2. Peran aktif LKM “Bligo Berseri”, Peran aktif LKM dalam hal ini menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dan sebagai dewan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan PNPM-MP.
3. Komitmen para pelaksana, komitmen para pelaksana untuk melaksanakan semua program-program PNPM-MP sangatlah penting.
4. Dukungan dari Kelompok Kepentingan, pelaksanaan PNPM-MP berhasil apabila mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat, antara lain tokoh masyarakat, tokoh pemuda atau yang lainnya.

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan PNPM-MP di Desa Bligo meliputi:

1. Kurang aktifnya Pengawas UPK. Faktor internal ini adalah faktor dari dalam LKM sendiri, perangkat LKM ada yang kurang aktif yaitu pengawas UPK. Seharusnya pengawas UPK aktif karena perannya sangat penting, di Desa Bligo ditemukan ada 2 KSM yang sampai saat ini mengalami kemacetan pengembalian modal, disebabkan beberapa faktor. Salah satunya karena dana yang dipinjam tersebut tidak digunakan untuk suntikan modal usaha, tapi justru
-

untuk membeli kebutuhan pribadi. Akibatnya, pengembaliannya menjadi terhambat dan dana tersebut tidak berputar.

2. Keterlibatan masyarakat kurang merata dalam setiap kegiatan. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dilalui dalam beberapa siklus yang mensyaratkan keterlibatan masyarakat sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Melalui siklus ini, pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat dapat terbentuk. Tetapi realitas di lapangan, tidak demikian. Hal ini terjadi karena hanya melibatkan beberapa warga di setiap RT yang merupakan representasi atau wakil dari masyarakatnya, sehingga warga masyarakat yang lain kurang mengetahui pelaksanaan program tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Partisipasi masyarakat dalam rangkaian kegiatan PNPM-MP sangat berpengaruh besar terhadap jalannya proses pembangunan di Desa Bligo, penyelenggaraan pembangunan bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Desa saja melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat secara keseluruhan. Salah satu wujud tanggung jawab yang dimaksud adalah sikap saling mendukung dari anggota masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pembangunan yang ditunjukkan dengan adanya keterlibatan atau partisipasi aktif dari masyarakat.
- b. Adanya Faktor pendukung yaitu komitmen Kepala Desa, LKM, Pelaksana dan tokoh masyarakat sehingga program-program dapat terlaksana, namun ada juga kendala yang dihadapi dalam pembuatan keputusan dikarenakan tidak semua masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, banyak yang pergi berkerja. Selain itu masyarakat tidak ikut serta karena tidak faham akan jalannya kegiatan rapat. Hasil temuan lain dalam pelaksanaan Ekonomi Dana bergulir, terdapat 2 KSM yang belum lunas tunggakannya sehingga menyebabkan dana macet.

2. Saran

- a. Kegiatan pemberdayaan perlu ditingkatkan dengan menambah program program pemberdayaan yang ada, agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. LKM *Bligo Berseri* agar meningkatkan kinerjanya dalam pendampingan program PNPM Mandiri, utamanya dalam sosialisasi program karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami program PNPM
-

- Mandiri dan masih memandang PNPM Mandiri sebatas program pemberian kredit/pekerjaan dana.
- c. Masyarakat Desa Bligo Kecamatan Candi, diharapkan berperan serta dalam rangkaian kegiatan PNPM-MP mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan dan pemeliharaan, sehingga kelancaran dan keberhasilan program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Bligo dapat semakin baik.
 - d. Perlunya menjalin kemitraan dengan pihak luar untuk meningkatkan dana partisipasi demi keberhasilan pelaksanaan PNPM-MP Desa Bligo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Saiful. (2012). *Partisipasi Warga dalam pembangunan dan Demokrasi*. Jakarta: Averroes Press.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2012). *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*.
- Departemen Pekerja Umum. (2007). *Siklus kegiatan PNPM mandiri-P2KP, Refleksi Kemiskinan*.
- Keputusan Menteri Koordinator Penanggulangan kemiskinan Nomor: 23/KEP/MEKO/KESRA/XII/2007.
- Mardikanto, T. dan Soebianto, P. (2013) *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- Tjokroakidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaya. (1980). *Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung.
- UNAPDI. (1980). *Local Level Planning and Rural Development*. New Delhi: Concept Publishing Company.
- UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Suryamin. (2014). BPS: Inflansi, kemiskinan meningkat pada 2013. (online) www.voaindonesia.com. diakses pada tanggal 20 Januari 2014.
-

